



**DAMPAK RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG BARAT  
TAHUN 2013-2017**

Oleh

Mumuh Muksin<sup>1)</sup>, Hamzah Turmudi<sup>2)</sup> & Engkus<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung

Email: [1mumuhmuksin@uinsgd.ac.id](mailto:mumuhmuksin@uinsgd.ac.id)

**Abstract**

*The main problem in this study is the contribution of regional user fees to capital expenditure is still moderate. This is due to the contribution of regional user fees to capital expenditure is still not optimal. The purpose of this study is to find out how much influence the regional retribution has on capital expenditure at the Regional Financial and Asset Management Agency in West Bandung Regency in 2013-2017. The research method used is an associative research method. The object of this study is the financial statements from 2013-2017 which also serve as a sample for 5 years of the financial statements using the Rasi scale. The results of the analysis that the contribution of the Regional Retribution Against Capital Expenditure is in the medium influence criteria. Then an R figure of 0.557 is obtained, indicating that there is a relationship between Regional Retribution and Capital Expenditure. While the determination coefficient value that has been calculated as 55.7% is included in the medium effect criteria, so there is a moderate effect of the Regional Levies on Capital Expenditures, while the remaining 44.3% is determined by other factors not examined. Conclusions from data analysis in above, there is no positive and significant influence of the Regional Levies on Capital Expenditure in the Regional Financial and Asset Management Agency in West Bandung Regency in 2013-2017.*

**Keywords: Regional Finance, Regional Retribution & Capital Expenditures**

**PENDAHULUAN**

Di Indonesia yang lazim dipahami sebagai anggaran sektor publik adalah anggaran yang digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Untuk anggaran pemerintah pusat digunakan istilah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan aktivitasnya. Mengacu kepada Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan

ditetapkan dengan peraturan Daerah. Anggaran dalam Pemerintah Daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), (Kasmiri & Engkus, 2017). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD (Halim, 2007)

Dalam mengelola keuangannya, Pemerintah Daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang



dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 2 sumber PAD yang terbesar.

Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut : (1) Banyaknya potensi yang terdapat pada retribusi daerah yang belum mampu digali secara optimal.(2)Masih sedikitnya kontribusi retribusi daerah terhadap Belanja Modal Kabupaten Bandung Barat, dimana hampir setiap tahunnya retribusi daerah tidak mencapai target.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah”.

### Kerangka Pemikiran

Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu langkah yang dapat menjadi solusi peningkatan pelayanan publik yaitu dengan mengalokasikan belanja pada investasi modal. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD, (Mardiasmo, 2016) Disana dapat disimpulkan bahwa diharapkan peningkatan PAD dapat meningkatkan pula investasi modal.

Salah satu langkah yang dapat menjadi solusi peningkatan pelayanan publik yaitu dengan mengalokasikan belanja pada investasi modal. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD,(Mardiasmo, 2016)

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan dasar teori yang mendukung makan kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah :

### Gambar 1. Paradigma Penelitian



### LANDASAN TEORI

#### Administrasi dan Administrasi Publik

Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan organisasi tingkat apapun dapat dilaksanakan dengan baik. Proses administrasi akan melaksanakan tiga fungsi utama yang berhubungan erat dengan tiga tingkatan umum dalam hierarki formal(Anggara Sahya, 2012).

Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems



kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial (Henry dalam Pasolong, (Pasolong, 2013)

### **Keuangan Negara dan Daerah**

Keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada Perjan, Perum, PN-PN, sedangkan dalam arti sempit keuangan negara hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkannya. Dengan demikian tata kelola retribusi daerah merupakan keharusan. (Engkus E, 2019).

Bedasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang dimaksud Keuangan Negara adalah “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. (Presiden RI, 2003). Keuangan daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang dalam satu periode tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut, (Presiden RI, 2005). Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang dimaksud Sistem akuntansi keuangan daerah adalah Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan rangkap pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. (MENDAGRI, 2002)

### **Retribusi Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Pajak daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut adalah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah (Presiden RI, 1997).

Jenis retribusi daerah menurut (Mardiasmo, 2002) terdiri dari 3 macam yaitu (a)Retribusi Jasa Umum;(b)Retribusi Jasa Usaha;(c)Retribusi Perizinan Tertentu

Selain pajak, pemerintah dapat melakukan pungutan lain, yaitu retribusi. Terdapat perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi baik sumber, mekanisme pemungutannya maupun prestasi yang didapat dari pembayar. Namun perbedaan yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah manfaat yang didapat setelah membayar kewajiban tertentu.

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Terdapat tiga jenis retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu (Mahmudi, 2010)

Dalam pelaksanaan pungutan retribusi daerah tidak semua jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Seperti yang dikemukakan oleh Mahmudi (Mahmudi, 2010), bahwa tidak semua jasa bisa dikenakan retribusi. Sesuai dengan pasal 108 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan terdapat tiga jenis objek retribusi yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. (Presiden RI, 2009)

### **Jenis-jenis Retribusi Daerah**

Dalam pelaksanaan pungutan retribusi daerah tidak semua jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Seperti yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010: 25) bahwa tidak semua jasa bisa dikenakan retribusi. Sesuai dengan pasal 108 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan terdapat tiga



jenis objek retribusi yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. (1) Retribusi Jasa Umum Menurut Pasal 1 angka 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar, retribusi parkir ditepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. (2) Retribusi Jasa Usaha Menurut Pasal 1 angka 67 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta. Menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha ini dibagi menjadi 11 (sebelas) jenis retribusi antara lain: retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat parkir khusus, retribusi tempat penginapan, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyebrangan di air, retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah. (3) Retribusi Perizinan Tertentu Menurut Pasal 1 angka 68 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dikemukakan bahwa Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang/prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. (Presiden RI, 2009)

### **Belanja Modal**

**Vol.14 No.8 Maret 2020**

Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2004) “Belanja Modal adalah kelompok belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset)”. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang merupakan bagian dari klasifikasi belanja daerah yaitu kelompok belanja daerah menurut program dan kegiatan yang termasuk ke dalam kelompok belanja langsung dimana Belanja Modal digunakan untuk membiayai kegiatan investasi atau menambah aset yang dilakukan oleh pemerintah.

Sejalan dengan diselenggarakannya otonomi daerah, pemerintah harus dapat mengembangkan potensi yang ada pada daerahnya, sehingga apa yang menjadi tujuan dari beberapa otonomi daerahpun dapat terlaksana dengan baik. Menurut (Halim, A., & Kusufi, 2012) pengertian belanja modal adalah pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal (53) Ayat (1) adalah digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya. (MENDAGRI, 2006)

Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset tetap atau inventaris organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharannya. Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah menjelaskan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi masa manfaat lebih dari satu periode (dua belas bulan) (Buletin Teknis Komite Standar

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

**Open Journal Systems**



Akuntansi Pemerintahan (KSAP), 2006). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar mendefinisikan Belanja Modal.

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. (MENKEURI, 2007).

## **PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif yaitu membandingkan dua gejala atau lebih. Penelitian kuantitatif dapat berupa deskriptif maupun komparatif korelasional yang membandingkan variabel yang sama untuk sampel yang berbeda.

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih gejala atau variabel. Tipe penelitian eksplanatori yang digunakan peneliti adalah penelitian asosiasi atau korelasional. (Silalahi, 2013) menjelaskan bahwa penelitian korelasional, juga disebut kovariasional, mempelajari apakah perubahan nilai dalam suatu variabel ada hubungannya dengan perubahan nilai dalam variabel lain. Ada tidaknya hubungan tersebut dihitung berdasarkan koefisien korelasi.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Asosiatif karena digunakan untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2013-2017.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016)

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan yang ada pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2017.

Menurut (Silalahi Ulbert, 2015) sampel adalah satu subset atau tiap bagian dari populasi apakah representative atau tidak. Sampel merupakan bagian tertentu yang dipilih dari populasi. Lebih lanjut Ulber Silalahi menjelaskan pemilihan sampel dapat dilakukan apabila populasi terlalu besar sehingga sulit dijangkau oleh peneliti, sulit dalam mengolah data, biaya yang sangat besar dan waktu yang terlalu banyak.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini ialah menggunakan teknik sampling accidental. Pengertian sampling accidental Menurut silalahi adalah pemilihan sampel secara kebetulan atau aksidental, juga disebut sampel konvinien (convenience sampling), merupakan pemilihan sampel dari siapa saja yang kebetulan ada atau dijumpai menurut keinginan peneliti. (Silalahi Ulbert, 2015)

### **Variabel Penelitian**

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Adapun variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Variabel Independen

Variabel Independen/bebas sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan yang timbul pada variabel dependen (Sugiyono, 2016) Variabel independen dalam penelitian ini adalah retribusi daerah. Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menjelaskan definisi retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi. (Presiden RI, 2009) Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (2) Variabel Dependen



Variabel dependen merupakan variabel yang disebut juga output, kriteria, atau konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari keberadaan variabel bebas (Sugiyono, 2016).. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran. Selain itu akan menambah aset atau kekayaan daerah yang selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.(Presiden RI, 2010).

### Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data kuantitatif. Kuantitatif adalah mencatat nilai-nilai bilangan atau frekuensi untuk melukiskan berbagai jenis isi yang didefinisikan. Salah satunya terdapat dalam skala pengukuran. Contoh suatu pertanyaan/ Pernyataan yang memerlukan alternatif jawaban sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Dimana masing-masing pilihan diberikan skor.(Silalahi Ulbert, 2015)

Penelitian ini perlu didukung dengan adanya data yang akurat dan lengkap. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder yang dijelaskan Silalahi sebagai berikut : (1)Data primer adalah suatu objek atau dokumen original-material mentah dari pelaku yang disebut "*First-hand information*". Data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi dinamakan data primer. Individu, kelompok fokus, dan satu kelompok responden secara khusus sering dijadikan peneliti sebagai sumber data primer. Data primer yang digunakan peneliti berasal dari

lapangan yang dikumpulkan peneliti langsung dari instansi yang diteliti dengan menyebarkan kuesioner/angket.(2)Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain yang tersedia dinamakan data sekunder. Sumber sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original. Peneliti mengumpulkan data sekunder dengan mempelajari berbagai literature, dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.(Silalahi Ulbert, 2015)

### Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang metode penelitian, teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut : (1)Studi Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan yang dapat membantu dalam mempertegas orientasi dan dasar teoritis yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti dan data tersebut didapatkan dari dokumen/arsip Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bandung Barat dari tahun 2013-2017 yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat.(2)Studi Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku dan arsip-arsip pemerintah daerah yang berkaitan dengan masalah yang terjadi.

### Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan

Teknis analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial.(1)Pengujian Asumsi



Klasik:(a)Uji Normalitas Residual Uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Untuk menguji apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak maka digunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan metode grafik, yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal P-Pi Plot of regression standarized. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut adalah normal. Hasil uji dari normalitas dapat dilihat pada output hasil regresi, selain dari uji kedua tersebut, juga digunakan Skewnees dan Kurtosis.(b)Uji Auto Korelasi Uji auto korelasi digunakan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara periode (t) dengan periode sebelumnya (t-1). Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi auto korelasi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) :  $1 < DW < 3$ . (b) Uji Heterokedastisitas Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lainnya. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi Heterokedastisitas dengan metode grafik, yaitu dengan melihat pola titik-titik pada regresi. (2) Analisis Regresi Linier Sederhana Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independen dengan variabel dependen. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui arah hubungan anatara variabel dependen apakah positif atau negatif serta untuk memprediksi nilai variabel independen ini mengalami kenaikan atau penurunan. Adapun rumus untuk regresi linier sederhana adalah sebagai berikut (Silalahi Ulbert, 2015). Keterangan : Y = variabel terikat ; X = variabel terikat; a = konstanta; b = koefisien arah regresi, yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan

variabel terkait yang di dasarkan pada perubahan variabel bebas. Apabila (+) arah garis naik, apabila (-) arah garis turun.(1)Pengujian Hipotesis.(a) Uji-t, Uji-t digunakan untuk menguji pengaruh parsial variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya atau pengujian ini dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi setiap variabel bebas (independen) dalam mempengaruhi variabel terikat. Pada penelitian ini, uji-t digunakan untuk menguji apakah pertanyaan hipotesis benar atau tidak. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal.(a) Uji F, Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan  $F_i$  hitung dengan  $F_i$  tabel. Jika  $F_i$  hitung  $>$  dari  $F_i$  tabel, (H<sub>0</sub> ditolak, H<sub>1</sub> diterima). Sebaliknya jika  $F_i$  hitung  $<$  dari  $F_i$  tabel, maka model tidak signifikan, hal ini akan ditandai nilai koloni signifikansi (%) akan lebih besar dari alpha. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen Pengaruh retribusi daerah (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent Belanja Modal (Y) secara bersamaan.(b) Analisis Koefisien Determinasi Koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar variasi perubahan dalam satu variabel (dependen) ditentukan oleh perubahan dalam variabel lain (independen). Koefisien korelasi (untuk beberapa uji korelasi) digunakan untuk menentukan koefisien determinasi. Dalam konteks ini, koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Dinas

Perjalanan panjang pembentukan Kabupaten Bandung Barat sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung telah muncul sejak keluarnya surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat I Jawa Barat nomor 30 tahun 1990 tentang pola induk pengembangan wilayah provinsi daerah tingkat I Jawa Barat dalam jangka panjang (25-30) yang menyatakan



rencana penataan daerah tingkat I di Jawa Barat dari 24 menjadi 42 daerah tingkat II.

Isu pemekaran semakin menguat sejalan dengan dinamika sosial di wilayah Bandung bagian barat dan lahirnya UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang merubah secara mendasar uu nomor 5 tahun 1974. Hal ini ditandai dengan terbitnya keputusan DPRD Kabupaten daerah tingkat II Bandung nomor 5 tanggal 21 Juli 1999, tentang persetujuan awal terhadap pemekaran wilayah Kabupaten daerah tingkat II Bandung sebagai jawaban atas permohonan persetujuan dari pemerintah Kabupaten daerah tingkat II Bandung melalui surat bupati Bandung nomor 135/1235/tapem tanggal 22 Juni 1999 perihal permohonan persetujuan pemekaran wilayah kabupaten daerah tingkat II Bandung. Proses pemekaran sempat tertunda dan dihentikan prosesnya sementara disebabkan adanya aspirasi peningkatan status kotif Cimahi menjadi daerah otonom yang akhirnya terwujud melalui pembentukan Kota Cimahi pada tahun 2001.

Untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung Barat untuk pertama kali dilaksanakan dengan cara penetapan berdasarkan pertimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta pemilihan umum tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung. Adapun peresmian pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2007.

Selanjutnya, dalam rangka kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pada tanggal 8 Juni 2008 telah diselenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pertama kali di Kabupaten Bandung Barat, dan sebagai hasil pemilihan, pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2008 dilantik Drs. H. Abubakar, M.Si dan Drs. H. Ernawan Natasaputra, M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang pertama di Kabupaten Bandung Barat.

Dalam perjalanan pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 12 Agustus 2011 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 20 tahun 2011

Vol.14 No.8 Maret 2020

tentang pembentukan Kecamatan Saguling, yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Batujajar, sehingga jumlah Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat menjadi 16 (enam belas) kecamatan. Dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2012 tentang hari jadi Kabupaten Bandung Barat, maka tanggal 19 Juni ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung Barat.

### Hasil Analisis Uji Asumsi Klasik

Sebelum diinterpretasikan kedalam analisis regresi linear sederhana, peneliti terlebih dulu harus memenuhi Uji Asumsi Klasik yang bertujuan untuk memenuhi apakah data mempunyai parian yang sama, serta untuk menguji kelinearitas data. Ada beberapa uji asumsi klasik adalah sebagai berikut: (1) **Uji Normalitas**, bertujuan untuk menguji apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak maka digunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan metode grafik, yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik normal P-P Plot of regression standardized. Sebagai salah satu syarat untuk uji asumsi klasik regresi linier sederhana yang baik berarti nilai residual harus berdistribusi normal. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS versi 17, pengujian menunjukkan bahwa nilai *Kolmogorov-smirnov* bernilai 0,376 dengan *Asymp.sig (2-tailed)* sebesar 0,999 > 0,05 maka dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal. (2) **Uji Autokorelasi**, digunakan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara periode (t) dengan periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS 17 diperoleh nilai Durbin-Watson (D-W) sebesar 3,005, sementara tingkat signifikansi pada tabel di sebesar 5% untuk jumlah variabel = 1 dan data sampel (n) = 5 diperoleh batas bawah nilai tabel (dL) = 0,6102 dan batas atasnya (dU) = 1,4002. maka dari itu nilai Durbin-Watson model regresi sebesar 3,005 berada diantara dU (1,4002) dan 4-DL (3,3898) atau dU (dU 1,4002 < 2,728 < 3,3898) artinya tidak terjadi autokorelasi. (3) **Uji Heterokedastisitas**, bertujuan untuk menguji apakah model regresi

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>





terjadi ketidaksamaan variance dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lainnya. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi Heterokedastisitas dengan metode grafik, yaitu dengan melihat pola titik-titik pada regresi. Apabila titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 di atas sumbu Y, dan tidak membentuk pola yang tertentu yang teratur maka dapat diaktakan bahwa tidak terjadi Heterokedastisitas.

Berdasarkan grafik Scatterplots pada perhitungan SPSS versi 17 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu yang teratur maka dapat dikatakan tidak adanya gejala Heterokedastisitas. (1) Analisis Regresi Linier Sederhana. Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independen dengan variabel dependen. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui arah hubungan anantara variabel dependen apakah positif atau negatif serta untuk memprediksi nilai variabel independen ini mengalami kenaikan atau penurunan.

Berdasarkan kolom Unstandardized Coefficients pada kolom B Perhitungan SPSS versi 17, menunjukkan model persamaan regresi linier sederhana  $Y = 3.444E11 + 0.003(X)$ . (1).

Konstanta sebesar 3.444E11 artinya jika Retribusi Daerah nilainya adalah 0, maka Belanja Modal nilainya sebesar 3.444E11. (2) Nilai positif sebesar 0.003 pada variabel bebas Retribusi Daerah menunjukkan arah hubungan variabel Retribusi Daerah dengan variabel terikat Belanja Modal adalah searah. Kemudian pada setiap kenaikan satu satuan Retribusi Daerah akan menyebabkan kenaikan pada Belanja Modal sebesar 0.003. (3) Signifikansi Regresi Parsial (Uji T), bertujuan untuk menguji tingkat signifikansi setiap variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Pada penelitian ini, uji t digunakan untuk menguji apakah hipotesis terhadap variabel berpengaruh atau tidak. Uji regresi parsial atau uji t ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel independen Retribusi Daerah yang sah secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal.

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Dengan menggunakan program SPSS 17, diperoleh hasil Thitung sebesar 1,942 dengan tingkat signifikansi 0,147. Jadi karena Thitung  $(1,942) < T_{tabel} (3,18245)$  dengan taraf signifikansi  $0,147 > 0,05$ . Hal ini berarti Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. (1) Uji F, bertujuan untuk mengetahui variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Taraf nyata yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% dengan derajat kebebasan  $df (k) ; (n-k)$  maka diperoleh  $F_{tabel} = (1) ; (5-1) = (1) ; (4) = 7,71$ .

Berdasarkan hasil output SPSS di atas menunjukkan  $F_{hitung} < F_{tabel}$  yaitu  $3,772 < 7,71$ , artinya tidak terdapat pengaruh simultan antara Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal. (1) Koefisien Determinasi ( $R^2$ ), Koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar variasi perubahan dalam satu variabel (Retribusi Daerah) ditentukan oleh perubahan dalam variabel lain (Belanja Modal).

Berdasarkan angka  $R^2$  (R Square) diperoleh angka sebesar 0,557 atau 55,7%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal sebesar 55,7%, sedangkan sisanya 44,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Berdasarkan tabel 4.10 dapat terlihat nilai koefisien determinasi sebesar 55,7% masuk kedalam kriteria pengaruh yang sedang.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten Bandung Barat melalui uji t, menunjukkan bahwa Thitung  $(1,942) < T_{tabel} (3,18245)$  dengan taraf signifikansi  $0,147 > 0,05$ , hal ini berarti Retribusi Daerah tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan analisis koefisien determinasi, diperoleh angka  $R^2$  (Rsquare) sebesar 0,557 atau 55,7%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen (Retribusi Daerah) terhadap variabel dependen



(Belanja Modal) sebesar 55,7% sedangkan sisanya 44,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Dengan demikian peneliti merekomendasikan bahwa potensi retribusi di kabupaten Bandung Barat masih potensial untuk dioptimalkan, sehingga secara teoretis optimalisasi potensi retribusi daerah berdimensi keunggulan/kompetensi sumberdaya; pengawasan dan pengendalian (Wasdal); dan regulasi. (Engkus, 2019)

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggara Sahya. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- [2] Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). (2006, April). *Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah*.
- [3] Engkus, E. (2019). Optimalisasi Potensi Retribusi Pasar Bale Endah Kabupaten Bandung. *MEDIA BINA ILMIAH*, 14(2), 2087–2094.
- [4] Engkus E. (2019). TATA KELOLA RETRIBUSI PASAR DI PASAR BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG. *MEDIA BINA ILMIAH*, 14 (5), 2591–2604.
- [5] Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- [6] Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- [7] Kasmiri, & Engkus. (2017). *Kamus Praktis Keuangan Daerah*. Bandung: FISIP Unpas Press.
- [8] Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- [9] Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- [10] Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- [11] Mardiasmo. (2016). *Perpajakan, Edisi Revisi* (Revisi, ed.). Yogyakarta.
- [12] MENDAGRI. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002*. , (2002).
- [13] MENDAGRI. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. , (2006).
- [14] MENKEURI. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar mendefinisikan Belanja Modal*. , (2007).
- [15] Pasolong, H. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- [16] Presiden RI. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. , (1997).
- [17] Presiden RI. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. , (2003).
- [18] Presiden RI. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. , (2005).
- [19] Presiden RI. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. , (2009).
- [20] Presiden RI. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. , (2010).
- [21] Silalahi, U. (2013). *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- [22] Silalahi Ulbert. (2015). *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [23] Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.